

ANALISIS KRITIS TERHADAP FENOMENA GOLPUT DALAM PEMILU

Nyoman Subanda

Abstract

Abstain phenomenon in which getting higher and higher is as a form and critical reaction of the society at once who care to democracy in order to recycle the ill – mannered democracy, doesn't work for people, procedural, in order to achieve a fair, cultural, peaceful, and lovely democracy. Abstain is an oppositionalized democracy and ideological criticism of democracy which doesn't give value of benefit to the voter. That's why abstain ideology is an action and smart political choice and ethically as a democratization of democracy at once. Abstain action which is getting higher and higher is a form of a pathetic society about the campaign or the political party promise to get the vote from the constituent with a very excellent motto but it doesn't change the policy pragmatically and ideologically, from the wish and demand of the society. It makes the society apathetical. Beside of being apathetical, they do unbelievable action to the leader who has power by doing abstain action as an opposition to find a true democracy again.

Keywords: abstain phenomenon, general election, democracy

A. Pendahuluan

Menjelang Pemilu 2009, wajah partai politik belum signifikan menampilkan pembaruan yang berarti. Hegemoni politik aliran (nasionalis vs agama), hegemoni politik teritorial (Jawa vs non Jawa), hegemoni politik profesi (militer vs sipil)

dan hegemoni politik tribalisme (suku, ras dan golongan) masih mewarnai perpolitikan Indonesia dan tampaknya belum cukup bagi parpol untuk berbenah dan mendamaikan keadaan ini. Setelah dua kali masa Pemilu, yakni pemilu 1999 dan pemilu 2004 ada kecenderungan kian terkikisnya pandangan positif publik terhadap parpol. Bahkan kini muncul sikap pragmatis masyarakat terhadap parpol. Meski bermunculan parpol baru, masyarakat menganggap parpol belum mampu memenuhi aspirasi masyarakat.

Kondisi tersebut terungkap dalam survei Indo Barometer (M. Qodari), bahwa Publik menganggap peran parpol paling menonjol adalah memperjuangkan kepentingan partai dan pengurus partai itu sendiri (18,3%), disusul memperebutkan kekuasaan di pemerintahan (18,3%). Adapun peran positif seperti pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan persentasenya hanya kecil, masing-masing 7,5% dan 2,6%. Mereka yang tidak puas menilai parpol tidak pernah memperjuangkan kepentingan rakyat, kerja parpol tidak dirasakan rakyat, dan parpol tidak bermanfaat. Di sisi lain, kiprah parpol sebagai entitas politik lebih mencitrakan sebuah satuan politik untuk mencapai kekuasaan atau bentuk-bentuk keuntungan materi lainnya daripada sebagai saluran kehendak umum.

Lebih menyedihkan lagi, peran parpol sejak tahap pengorganisasian internal, penyerapan dan pelaksanaan aspirasi masyarakat, sampai dengan kemampuan mereka dalam mengambil jarak terhadap kebijakan Pemerintah sebagai pengoreksi juga sangat rendah. Yang terjadi, parpol malah menjadi pemberi stempel dengan melegitimasi kepentingan penguasa. Lebih parah lagi, beberapa parpol justru menjadi kaki tangan kepentingan asing dengan menngesahkan UU Migas, UU Penanaman Modal, UU SDA, UU Parpol, UU Pornografi. Akibat semua itu sangat wajar jika kini semakin banyak masyarakat yang lebih senang berdiam di rumah atau mengerjakan hal lain ketimbang datang ke tempat pemungutan suara. Fenomena ini bisa menjadi bukti telah terjadi krisis kepercayaan di dalam diri masyarakat terhadap parpol, (dikutip dari Yulianto).

Selalu ada sisi lain dalam setiap perubahan yang dibuat.

Diibaratkan api dan air yang bermusuhan sehingga air memperkuat diri menjadi es, namun api melelehkannya. Lalu air berpikir untuk menjadi diri sendiri "cair" dan akhirnya air mampu memadamkan api. Artinya, tidak ada yang paling baik dan jelek di sistem demokrasi yang sudah kita pilih, semuanya tergantung pada kemampuan penerapannya. Begitu juga dengan fenomena Golput yang ada di berbagai tempat di Indonesia yang terlahir dari rasio dan peluang demokrasi itu sendiri. Namun pada akhirnya kita percaya, bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang mampu mengobati dirinya sendiri di tengah serangan Golput dewasa ini. Diibaratkan demokrasi terkoreksi antara anugerah dan musibah, seperti fenomena Golput di bawah ini :

B. Fenomena Golput di Era Reformasi

Menurut catatan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dari 26 Pemilu kepala daerah tingkat provinsi yang berlangsung sejak 2005 hingga 2008, 13 pemilu gubernur justru dimenangi golongan putih alias golput. Artinya, jumlah dukungan suara bagi gubernur pemenang Pilkada kalah ketimbang jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Kondisi itu menular ke Ibukota Negara DKI Jakarta. Jumlah masyarakat yang tidak memilih diperkirakan mencapai 39,2%. Nilai ini setara dengan 2,25 juta orang pemilih, sementara sebagai pemenang, Fauzi Bowo hanya dipilih 2 juta orang pemilih (35,1%). Menurut hasil survey Lembaga Survey Indonesia (LSI), angka golput malah jauh lebih besar, yakni mencapai 65%. Direktur LSI Saiful Mujani memperkirakan, besarnya potensi golput Pilkada DKI Jakarta karena sebagian besar warga Ibukota meragukan proses pesta demokrasi yang baru pertama kali digelar di Jakarta ini.

Dari DKI Jakarta, Pilkada berlanjut ke Jawa Barat. Meski pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf berhasil mengantongi suara terbanyak dibandingkan kontestan lain, yaitu dengan perolehan 7.287.647 suara, jumlah golput jauh lebih besar; mencapai 9.130.594 suara. Begitu juga pada Pilkada Jawa Tengah yang dimenangi pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih dengan 6.084.261 suara. Jumlah golput di Jawa Tengah justru menembus angka 11.854.192 suara. Angka ini sangat menggiurkan

bagi Parpol peserta Pemilu 2009. Di Provinsi Jawa Timur, meski harus ditempuh dalam dua putaran, pada putaran pertama sudah terlihat; golputlah pemenangnya. Ketidakpercayaan warga Jawa Timur terhadap pagelaran demokrasi Pilkada menunjukkan angka yang cukup fantastis. Jumlah golput pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 23 Juli lalu, mencapai 38,37% suara, atau 11.152.406 juta penduduk tidak menggunakan hak pilihnya. Menurut catatan KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Jatim, jumlah suara sah dalam Pilgub sebanyak 17.014.266 juta, sedangkan yang tidak sah ada 895.045 suara. Total pemilih Pilgub Jatim sebanyak 29.061.718 juta penduduk. Tidak beda jauh dengan Pilgub, Pilkada kabupaten/kota mengalami hal sama. Catatan JPPR menunjukkan, dari 130 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilu, 39 Pilkada kabupaten/kota, golput menempati nomor jadi. Koordinator Nasional JPPR Jeirry Sumampow mengatakan, bahwa rendahnya partisipasi masyarakat membuat legitimasi gubernur-wakil gubernur, bupati/walikota- wakil bupati/wakil wali kota terpilih sangat rendah di mata rakyatnya sendiri. Hal ini menunjukkan, besarnya jumlah golput dalam Pilkada akan merembet dan mempunyai hubungan positif (linier) ke Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden pada 2009.

Memang Golput bukanlah pilihan bijak, namun tetap Golput adalah hak suara. Mengapa? Pertama, pilihan untuk tidak memilih adalah bentuk pemborosan terhadap anggaran belanja Negara. Kedua, legitimasi kekuasaan calon terpilih tidak mewakili aspirasi rakyat, dalam arti legitimasi uji materi dan uji publik calon terpilih tidak valid dan bisa memunculkan pembangkangan sipil di kemudian hari. Pemilihan langsung seperti saat ini adalah bentuk pilihan rakyat atau dengan bahasa lain berkonotasi bebas melakukan apa yang dikehendaknya karena dipilih rakyat. Sebenarnya hal ini menjadi bumerang bagi golput. Bahwa, Golput tidak mempunyai substansial dan prosedural yang sah dan dipandang sebagai kegagalan proses demokrasi. Ketiga, Golput adalah bentuk keluhan terhadap keadaan yang ada. Golput membuat kita nakal terhadap demokrasi, dalam arti demokrasi tidak rusak dan juga tidak

diperbaiki dengan adanya Golput. Artinya, keberadaan Golput adalah fenomena tawar menawar harga demokrasi dan ini merupakan bagian dari hak politik. Contoh, keberadaan Golput dipakai sebagai tekanan untuk memunculkan peraturan calon independen baik Gubernur/Bupati/Wali Kota/ Presiden untuk disyahkan menjadi UU.

Koalisi pemilih, Golput dan parpol membuat semua kepentingan menjadi senang. Negosiasi, kerumunan pendapatan, kontrak politik menjadi semakin dekat, seperti yang kita lihat dan dengar di radio, surat kabar dan TV. Hal ini sudah memunculkan komunikasi politik, dalam arti kita masih butuh hubungan parlemen antara presidentil, parlemen dan Golput yang ada. Koalisi haruslah efektif dan produktif, demikian juga dengan kepentingan Golput harus diakomodir sehingga demokrasi tidak terjebak dalam tradisi politik yang primordial. Artinya, secara institusi demokrasi kita kuat, secara legitimasi demokrasi kita masih lemah dan koalisi antara pemilih, Golput dan parpol adalah pemecahannya. Diperlukan sosok pengertian dan pemahaman antara yang mempunyai wewenang politik lewat serikat suara (pemilih, Golput dan parpol) agar penetrasi suara menunjukkan kecondongan suara rakyat. Dengan kata lain, Golput adalah kekuatan bayangan yang berposisi sebagai peniru pasar politik atau oposisi samaran dan cenderung membesar bila demokrasi itu sendiri melukai dirinya sendiri.

C. Makna Golput

Golput bisa diartikan sebagai protes atau penolakan terhadap mekanisme dan sistem yang sedang berjalan. Dan hendaknya harus kita sikapi dengan etika, moral dan *civil society* sebagai hal yang positif terhadap masalah-masalah yang sifatnya struktural, substansi dan prosedural sebagai sebuah gerakan moral politik. Artinya, partai politik dalam mengusung calon harusnya memberi ruang kepada masyarakat pemilih dalam merumuskan kepentingan dan konfirmasi kepada pendukung dalam mengusulkan calon dalam kontestasi politik. Jika tidak, tingginya angka Golput menjadi pekerjaan rumah bagi partai-partai politik di Indonesia untuk secepatnya kembali memikirkan

formulasi agar konstituennya bisa kembali pulang kandang dan merapat.

Golput menuai tafsir sebagai manifestasi sikap kritis yang menghendaki adanya perubahan sistem politik dalam *electoral law* dan *electoral process*. Pada Pilkada Jakarta, momentumnya adalah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan UU Pemerintahan Daerah terkait item calon perorangan. Seperti kita tahu, menjelang pelaksanaan PILKADA Jakarta, secara bersamaan keluar keputusan MK yang melapangkan jalan adanya calon perorangan dalam PILKADA. Seperti diketahui, menjelang pelaksanaan PILKADA, kandidat-kandidat yang tidak mendapatkan kendaraan politik kemudian menggunakan peluang politik dengan adanya calon perorangan dalam PILKADA, meski keputusan MK itu belum operasional. Mencuatnya angka golput bisa dibaca bahwa masyarakat tidak peduli terhadap politik. Masyarakat tidak hirau, tidak peduli dengan arah kebijakan politik. Dengan demikian, fenomena golput bisa diartikan bahwa tingkat apatisisme politik masyarakat terhadap masalah politik sangat rendah. Tentu apatisisme politik seperti itu terkait dengan perjalanan politik selama ini, dimana tingkat partisipasi masyarakat politik yang tinggi setelah reformasi, tetapi tidak ada korelasinya dengan membaiknya tarap kehidupan masyarakat bidang ekonomi dan politik. Politik dengan demikian, hanya menjadi urusan elit belaka dan tidak memiliki hubungan dengan masalah-masalah nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan argumen di atas ada beberapa hal yang perlu dicermati pada fenomena golput di atas : *pertama*, Golput mampu menyeruak menjadi basis atas ketidakpercayaan pada kader parpol. Fenomena golput juga dapat menjadi simbol '*pembejaraan*' bagi setiap parpol, karena dari beberapa survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei nasional menunjukkan bahwa kondisi parpol saat ini mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. *Kedua*, Golput mencoba diakui sebagai sebuah peradaban semacam ideologi (hak asazi manusia) dengan alasan kapok karena parpol yang ada dianggap tidak *capable*, dan melanggar janjinya. *Ketiga*, persoalan ekonomi, masyarakat lebih

mengutamakan adanya pendapatan dan pekerjaan. Mereka tidak mau meninggalkan pekerjaannya untuk memilih, karena merasa jenuh dan tidak mau terlibat politik. Yang penting bagaimana memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. *Keempat*, alasan teknis yaitu proses pendaftaran pemilih yang masih belum tertib dan banyak manipulasi data pemilih. Dengan kata lain, koordinasi antar departemen yang terlibat belum terlihat jelas dan masih tumpang tindih, terutama data jumlah pemilih dan mekanisme yang panjang dan menjelinet.

Kearifan Golput adalah fenomena kerusakan dan sekaligus proses perbaikan politik. Bila gagal, demokrasi akan mereduksi dirinya sendiri sebagai bentuk festival yang penuh pesta pora dan kepentingan. Dalam arti, Golput adalah kekuatan dan sekaligus menjadi ancaman dalam pengkhianatan terhadap ideologi bangsa. Kita mestinya belajar banyak dari pengalaman Majapahit dan penjajahan Kolonialisme. Artinya kekuatan integrasi politik sangat mendesak kita perlukan dan kita distribusikan ke *nation state* ini. Jangan sampai kita menunggu kesalahan-kesalahan yang kita pernah buat yang menjamin bagi kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Tidak layak bagi Golput untuk selalu di cap negatif, namun lebih kepada bagaimana mengelola perbedaan sebagai momentum kedaulatan rakyat tercipta atas sepengetahuan dan keterlibatan penuh dari rakyat itu sendiri.

D. Akar Permasalahan Makin Berkembangnya Golput

Golput berkata persoalan ekonomi lebih penting dalam penanganan bangsa ketimbang politik. Artinya, masyarakat lebih mengutamakan persoalan piring nasi. Tingkat pemenuhan kebutuhan pangan menjadi lebih penting dibanding dengan persoalan penggunaan haknya dalam konstelasi politik. Jika ini benar, maka bisa ditarik kesimpulan sementara, persoalan pekerjaan dan pendapatan adalah masalah persoalan utama politik. Artinya, ke depan isu ekonomi, tenaga kerja dan kesenjangan adalah isu politik bagi bangsa ini, isu lama tapi belum tercapai dengan optimal. Yang jelas, Golput harus dikelola dengan melakukan gerakan kultural lewat pendidikan dan sosialisasi politik untuk mengembalikan semangat memilih.

Angka golput akan menjadi sangat kontraproduktif ketika pemilu dihadirkan dan golput tidak akan pernah melahirkan pemimpin yang baik. Komentar dan pergumulan Golput idealnya datang dari para elit politik dan kaum akademikus dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi yang ada.

Selain permasalahan di atas, golput juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kegagalan peran negara, demokrasi tanpa substansi, serta pemilu yang tidak bermanfaat langsung kepada rakyat. Kegagalan peran negara berdasarkan Studi yang dilakukan *world economic forum* dari *Universitas Harvard* sekitar tahun 2002 menyebutkan kegagalan negara dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain :

Tingginya angka kriminalitas dan kekerasan, korupsi yang merajalela, opini publik yang tidak terbina dengan baik serta suasana ketidakpastian yang tinggi. Suasana ketidakpastian dapat dilihat dari ketidakpastian di bidang ekonomi, keamanan, dan politik. Untuk bidang politik ada tiga isu utama ketidakpastian yang dapat dicermati. Tiga ketidakpastian dalam dunia politik tersebut dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Pertama, geopolitik yaitu politik menjadi ruang global yang menembusi sekat dan ruang tanpa batasan geografis yang jelas sehingga kehilangan roh dan orientasinya bagi masyarakat karena efek abad informasi dan globalisasi. **Kedua**, politik ruang yaitu ruang publik yang menjadi orientasi politik mengalami disorientasi karena faktor ruang maya yang mengutamakan pencitraan. Politik menjadi maya tanpa realitas karena ruang janji lebih dominan daripada ruang aksi. **Ketiga**, politik waktu yaitu esensi dan substansi politik tidak diutamakan karena mengutamakan kecepatan dan percepatan informasi untuk mencapai kepentingan. Hal ini melalui gejala kaderisasi dan rekrutmen partai yang tidak jelas serta munculnya caleg-caleg bermasalah dan karbitan

Tiga isu utama inilah yang membuat politik kita, meminjam istilahnya Yasraf A. Pilliang mengalami transpolitika karena adanya persilangan politik dengan media, politik dengan dunia hiburan, politik dengan seksualitas, politik dengan komoditi.

Pergeseran fungsi politik ini membuat masyarakat tidak puas akan kinerja politik yang jauh dari kenyataan dan harapan mereka . Fenomena golput merupakan reaksi atas gejala politik yang gagal membawa perubahan bagi masyarakat .

Sistem politik berubah ,banyak partai-partai baru bermunculan ,otonomi daerah dan pilkada diberlakukan. Semuanya dilakukan dengan harapan akan membawa perubahan dan perbaikan masyarakat . Tapi harapan tinggal harapan ,korupsi semakin merajalela ,kemaksiatan meningkat aset –aset nasional banyak yang dijual kepada asing , partai politik saling cakar-cakaran sendiri ,anggota legislatife bermain money politik . Semua kebobrokan itu terjadi pada tingkat pusat sampai kepelosok-pelosok daerah . Pada kondisi seperti itu apa yang diharapkan masyarakat? Rakyat tak berdaya dan tak bisa berbuat apa-apa kecuali menunjukkan rasa kekecewaannya dengan golput dalam setiap pilgub /pilkada.

Fenomena tingginya angka golput dan kecendrungan yang terus meningkat pada era reformasi ini lebih menunjukkan meluasnya apatisisme rakyat terhadap proses rekrutmen pemilihan pemimpin di daerah-daerah di seluruh Indonesia, apatisisme ini muncul karena sudah berkali-kali di kecewakan pada pemilu maupun pilgub atau pilkada. Pergantian person pemimpin ternyata sama sekali tidak membawa perubahan perbaikan. Bagi rakyat kemudian muncul kesimpulan yang merata bahwa siapa saja yang memimpin tidak ada bedanya. Jadi untuk apa diadakan pemilu atau pilkada yang menghabiskan uang miliaran rupiah kalau toh hasilnya sudah sama-sama diketahui akan sama saja. Pada kondisi begitu, rasanya sangat sulit untuk mendapatkan seorang pemimpin yang bersih, jujur, amanah, dan layak di percaya baik di kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif.

Krisis kepercayaan ini tentu tak lepas dari ulah partai-partai politik sebagai infrastruktur yang mengolah, mengkader dan memproses elit politik. Masyarakat Indonesia ditengarai semakin apatis dan tidak lagi mengapresiasi keberadaan partai-partai politik, sebab keberadaan partai politik dianggap tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk mengartikulasikan aspirasi masyarakat.

E. Pemilu Tanpa Makna

Pemilu yang melelahkan, biaya yang besar, tidak memberikan faedah langsung bagi rakyat. Pemilu tidak menyelesaikan kemelut rakyat lapar yang menggantung diri karena tidak mampu membayar uang sekolah anaknya atau ibu membakar anaknya karena beban hidup yang teramat berat. Juga Negara yang lupa meningkatkan kesehatan publik sehingga munculnya aneka penyakit dan kasus mutilasi. Dengan kata lain kepemimpinan politik produk pemilu ternyata tidak mampu membebaskan rakyat yang terbelenggu. Padahal, masa depan politik kebangsaan menjadi suram jika kepemimpinan politik menaggalkan sensitivitas moral dan kepekaan sosial bagi proses penyelenggaraanya.

Pemimpin produk pemilu harus memiliki *sense of crisis*, ikut merasakan penderitaan rakyat sehingga melahirkan kebijakan dan keputusan yang *propoor, projob dan prodevelopment*. Maka, yang diperlukan adalah kepekaan etis untuk mengutamakan hajat hidup orang banyak diatas pamrih kekuasaan individu maupun kelompok dan menjalankan kekuasaan secara jujur dan tulus.

Namun yang terjadi sungguh mengerikan, saat nasib rakyat tak terurus kepemimpinan politik telah melahirkan banalitas dan binalitas politik, dimana politik itu akan menjadi dangkal, tawar dan sia - sia karena mengedepankan nafsu dan kepentingan pragmatis. Selain pemimpin produk pemilu yang tidak bekerja untuk hajat hidup orang banyak juga partai politik sebagai institusi demokrasi telah melahirkan politik eksklusif bukan politik inklusif, ideologi yang tidak jelas, program yang tak terarah, manajemen partai yang tidak terorganisir, konsolidasi partai melalui rekrutmen dan pengkaderan yang mandek telah melahirkan kinerja politik yang jauh dari kesejahteraan sosial. Fenomena golput adalah jawaban rakyat atas pemimpin dan partai serta politik yang tidak mengoptimalkan fungsinya bagi pemilihnya.

Konstituen atau para pemili dan para peserta pemilu atau yang disebut parpol, menawarkan janji-janji atau programnya

pada masa kampanye, sedangkan konstituen terjebak atau sepaham dalam ideologinya partai yang bermuara terhadap radikalisme dan anarkisme.

Dari program-program yang telah disosialisasikan pada masa kampanye, secara implementasinya pada akar rumput, ternyata tidak sesuai dengan program-program pada saat kampanye, sehingga munculnya paham golongan putih atau golput yang merupakan representatif konstituen akan ketidak sinkronisasinya program-program dengan implementasi.

Hal mendasar inilah yang menjadi golput kian bertambah tiap tahun berujung pada kepercayaan publik semakin menurun terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, sehingga golput bagi masyarakat bukan lagi menjadi fenomena tetapi realitas dan cara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat akan masa depan demokrasi.

F. Penutup

Fenomena golput merupakan reaksi dan pembangkangan sipil dari rakyat karena karya demokrasi kita yang lebih bersifat proses, prosedural daripada hasil, kesejahteraan rakyat sebagai substansi yang diperjuangkannya.

Dalam karya agungnya, *the city of God St. Agustinus* berpendapat bahwa cinta dan kasih merupakan nilai ideal dalam pembanguna kota atau Negara. Sorotan St. Agustinus ini tentang kota ideal ini bukan tatanan fisik kota yang dipanoramai oleh gedung-gedung dan jalur jalan, tetapi kondisi masyarakat yang adil,damai, bahagia dan sejahtera sebagai hasil utama dari perjuangan demokrasi yang bekerja untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Namun kehidupan sosial negaa kita benar-benar kontradiktif seperti paksaan politik unilateral, komunikasi politik yang tidak membangun peradaban, cerdas lewat iklan politik, ketidakadlan, opresi, kekerasan, dan KKN yang merajalela.

Fenomena golput yang berkembang akhir-akhir ini dalam masyarakat kita merupakan reaksi yang bersifat etis moral dan politik terhadap fenomena kehidupan bangsa yang sifat

kontradiktif dan melawan martabat luhur kemanusiaan. Fenomena golput adalah reaksi terhadap turbelensi politik yang kotor, jijik, dan tidak berpihak pada realitas kehidupan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Golput merupakan keinginan rakyat untuk menciptakan peradaban kota ilahi, kota ideal, seperti yang dicita-citakan oleh St. Agustinus dalam beberapa abad yang silam. Kota ideal ini akan terwujud jika kita mengedepankan dan mengutamakan kesejahteraan sosial, keadilan bagi semua orang sebagai nilai substansi dari demokrasi.

Daftar Pustaka

- Dharma Hartawan, 2008, *Bali Merdeka*, Pusat Analisis Dan Kajian Indonesia, Bali.
- Dharma Hartawan, 2007, *Brain Economy Analisis Dan Kajian Ekonomi Politik Keuangan Negara*, Pusat Analisis Dan Kajian Indonesia, Bali.
- Jawa Post*, 12 Pebroari 2008
- Jeirry Sumampow, 2008, *Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)*, Jakarta.
- Kompas*, 9 Maret 2007.
- Kompas*, 27 Maret 2008.
- Kompas*, 5 November 2008.
- Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) terhadap hasil dari Pemilu 1999
- M. Qodari, 2008, *Lembaga Survei Indo Barometer*, Jakarta.
- Piliang, Yasraf, 2005, *Transpolitika Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Rachman, Fadjoel, 2007, *Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat*, Kukusan- Depok: Koekoesan.
- Saiful Mujani, 2008, Lembaga Survey Indonesia (LSI) Jakarta.
- UU No.10 / 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.
- [www. Lsi.co.id](http://www.Lsi.co.id)